



PERLU DITATA: Warga melintas di jembatan yang membentang di atas Sungai Winongo, Bener, Kemantren Tegalarjo, Kota Jogja kemarin (14/4). Sampai saat ini masih terdapat 41,50 hektare kawasan kumuh yang tersebar di sembilan kemantren.

41,50 Ha Kawasan Kumuh Masih Jadi PR

Pemkot Jogja Tingkatkan Sarpras di Bantaran Sungai

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk menyelesaikan persoalan kawasan kumuh. Sebab sesuai data Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, luas kawasan kumuh mencapai 41,50 hektare (Ha).

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Kota Jogja Sigit Setiawan mengatakan, kawasan kumuh tersebar di sembilan kemantren yang memiliki bantaran sungai. Terluas berada di Kemantren Mantrijeron dengan 12,89 hektare, lalu disusul Kotagede 7,91 hektare, dan Wirobrajan 7,08 hektare.

Sigit menyebut, upaya pengentasan kawasan kumuh terus dilakukan. Fokusnya dengan peningkatan kualitas jalan lingkungan, serta pembangunan sambungan limbah domestik terpusat dan komunal. Kemudian penyediaan saluran drainase di sekitar rumah-rumah warga.

Melalui program tersebut, pihaknya mampu mengentaskan 15,64 hektare kawasan kumuh di sepanjang 2025. Sebab sebelumnya, luasan kawasan kumuh mencapai 57,14 hektare. "Untuk data kawasan kumuh kami *update* periodik per tahun," ujar Sigit saat dikonfirmasi kemarin (14/4).

Sigit menjelaskan, bahwa permukiman bisa dikatakan kumuh jika tidak memenuhi tujuh aspek kelayakan. Meliputi keteraturan bangunan, kelayakan akses jalan, ketersediaan drainase, pengelolaan sampah, penge-

lolaan air limbah, ketersediaan air minum, dan proteksi kebakaran. Oleh karena itu, pengentasan kawasan kumuh ditarget selesai pada 2029. "Kami berharap kawasan kumuh sesuai target," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan, penanganan permukiman kumuh juga dilakukan dengan kerja sama berbagai pihak. Baik itu lembaga pendidikan maupun pengusaha. Bentuknya lewat pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Hasto mengungkapkan, pada 2025 sebanyak 82 rumah berhasil diperbaiki tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Kemudian pada 2026, ditargetkan meningkat menjadi 200 rumah. "Target kami 200 rumah bisa diselesaikan dengan pola gotong royong," harapnya. **(inu/eno/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005